



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PADA MUSRENBANG RKPD
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2018

Disampaikan oleh:
Plt. DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Ir. DIAH INDRAJATI, M.Sc
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jambi, 5 April 2017



Ir. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia



TJAHJO KUMOLO, SH.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Drs. H. M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

NAWA CITA

2014 - 2019

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

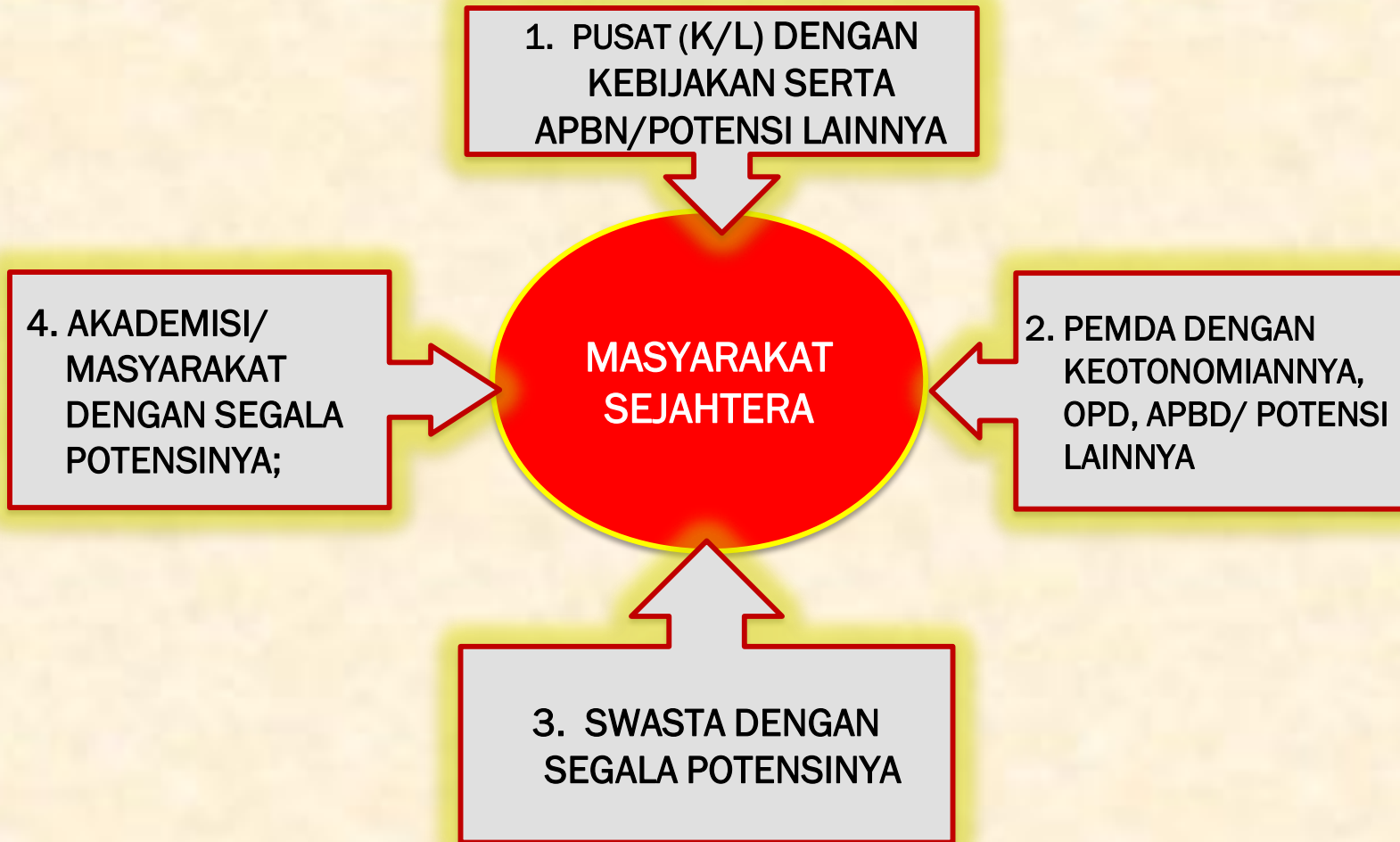


ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI (RPJMD Provinsi JAMBI 2016-2021)

- 1. Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik;**
- 2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi;**
- 3. Predikat Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia**
- 4. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) belum optimal dan kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup;**
- 5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur umum;**
- 6. kesenjangan ekonomi ditandai tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin;**
- 7. poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);**
- 8. Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif;**
- 9. perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs;**
- 10. kedaulatan pangan dan energy;**
- 11. Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dan Provinsi berbatasan.**



PELAKU PEMBANGUNAN





KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PENYELARASAN PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI JAMBI TAHUN 2018

NASIONAL

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan dan Permukiman
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
5. Ketahanan Energi
6. Ketahanan Pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Infrastruktur, Konektivitas dan kemaritiman
9. Pembangunan Wilayah
10. Politik, Hukum, pertahanan dan Keamanan



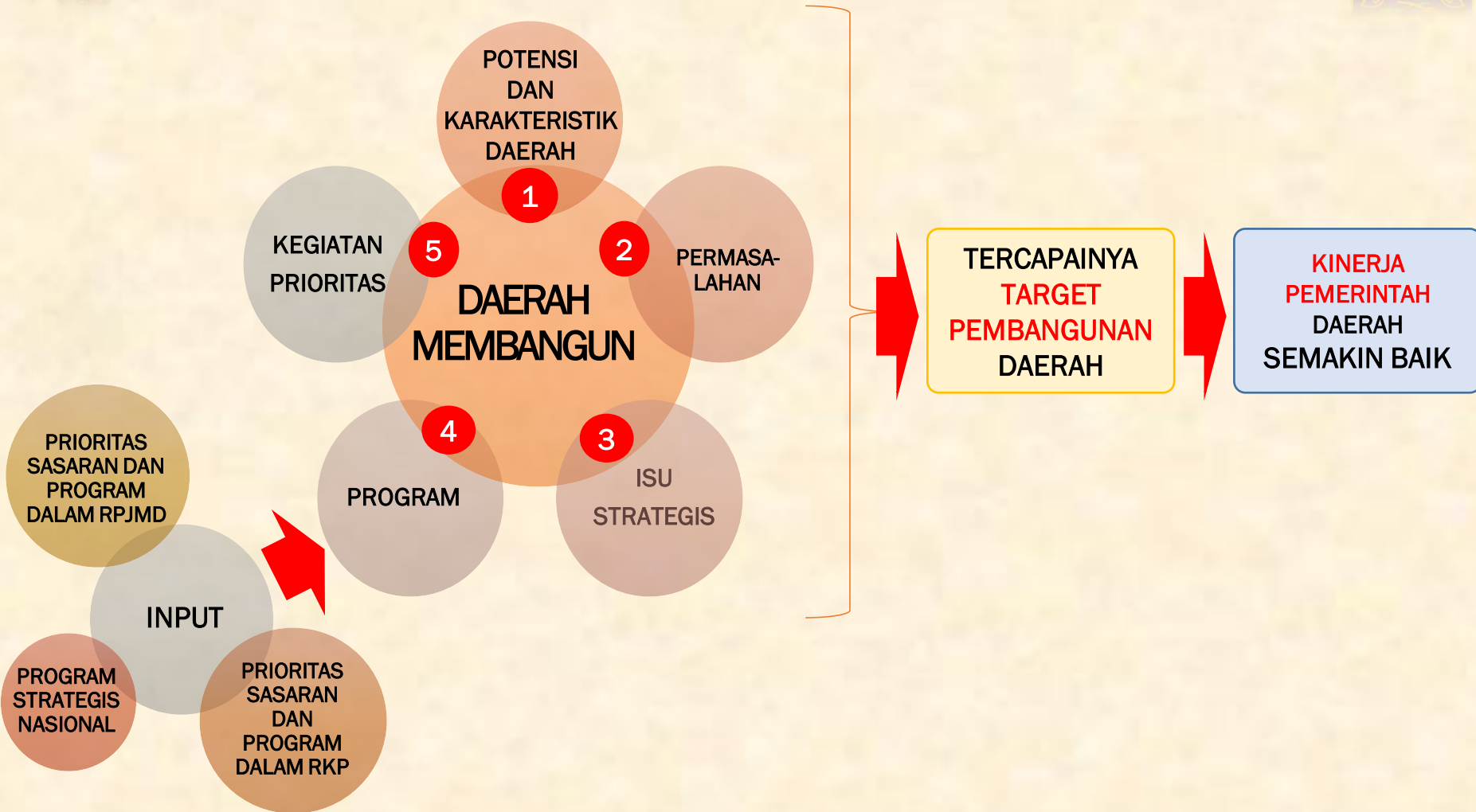
PROVINSI JAMBI

1. Tata kelola pemerintah, ketenteraman dan Ketertiban umum
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Pembangunan ekonomi
5. Pengembangan Wilayah, SDA dan LH
6. Ketahanan pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan





FOKUS DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMBANGUNAN



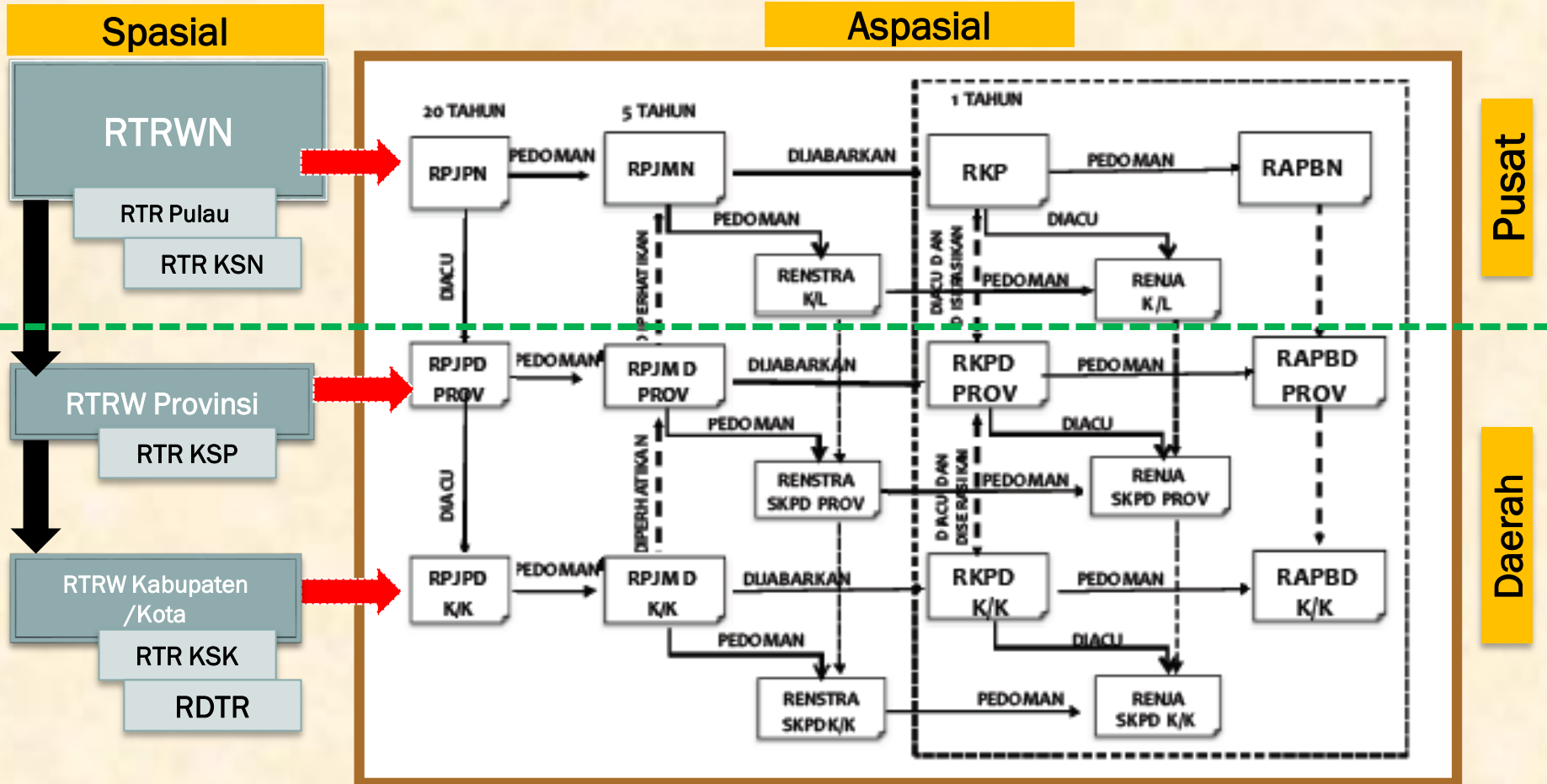
FAKTOR PENTING DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KETERKAITAN DAN HUBUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA TATA RUANG DAERAH



Tata Ruang sebagai acuan dalam perencanaan → harus diimplementasikan....!!!



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



SASARAN MAKRO 2015-2019

Dalam Melaksanakan Pembangunan Provinsi JAMBI perlu dipedomani beberapa Sasaran Makro dalam RPJMN, antara lain :

| NASIONAL | PERTUMBUHAN EKONOMI | KEMISKINAN | PENGANGGURAN |
|----------|---------------------|------------|--------------|
| | 6,1% | 9-10,5% | 5,3-5,5% |

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2018 Bappenas



| NO | PROVINSI | PERTUMBUHAN EKONOMI | KEMISKINAN | PENGANGGURAN |
|-----|----------------------|---------------------|------------|--------------|
| 1. | ACEH | 6,98 | 15,86 | 7,5 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 6,45 | 9,18 | 5,3 |
| 3. | SUMATERA BARAT | 6,86 | 6,03 | 5,4 |
| 4. | RIAU | 5,03 | 7,40 | 3,3 |
| 5. | KEPULAUAN RIAU | 7,5 | 5,26 | 4,3 |
| 6. | JAMBI | 6,66 | 7,57 | 2,7 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | 6,72 | 12,81 | 4,9 |
| 8. | KEP. BANGKA BELITUNG | 6,26 | 4,42 | 2,9 |
| 9. | BENGKULU | 6,38 | 16,75 | 3,0 |
| 10. | LAMPUNG | 6,55 | 12,84 | 4,4 |

Sumber : Buku III RPJMN Tahun 2015-2019



LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
2015-2019

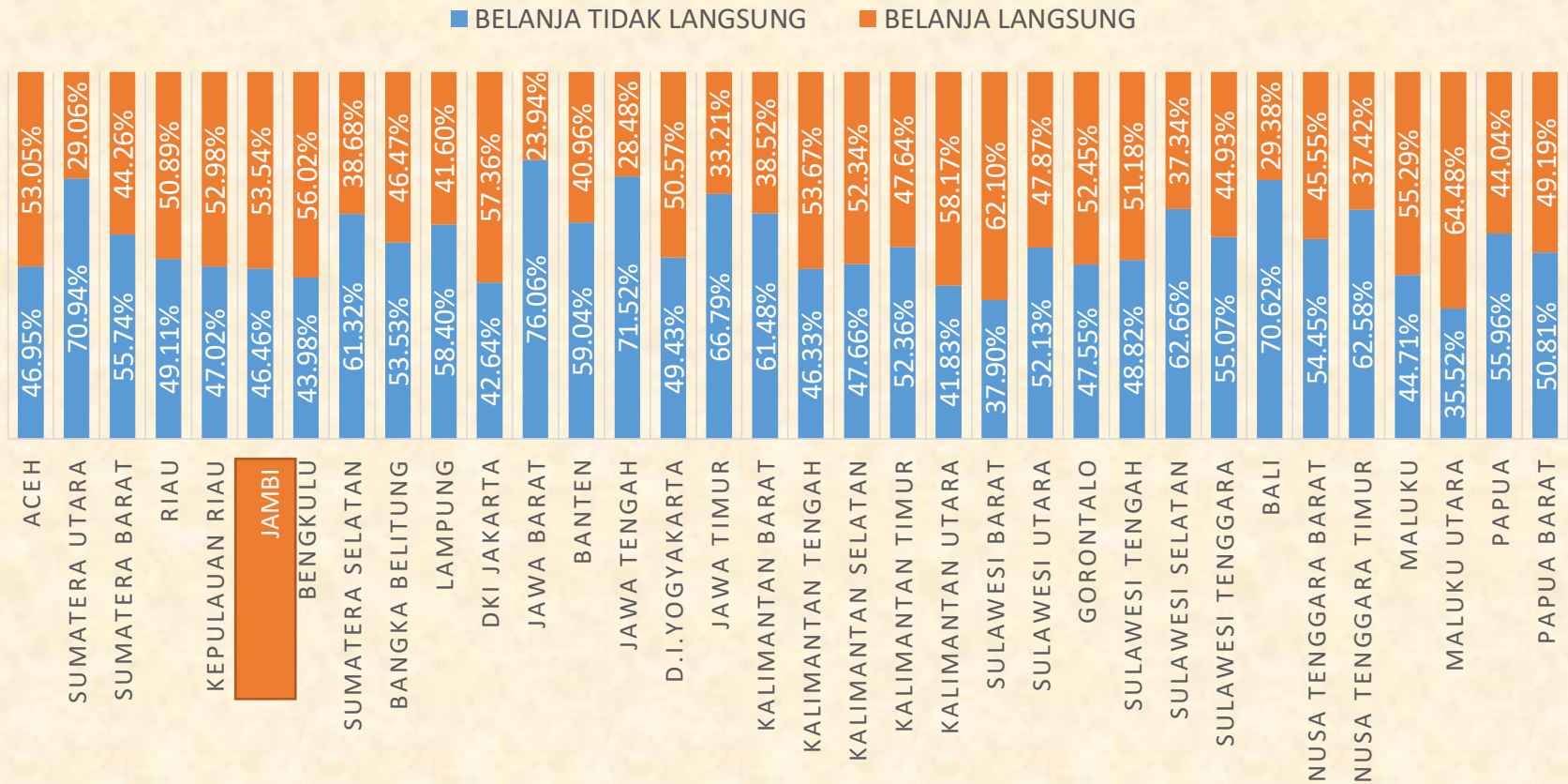
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong

Buku III
Agenda Pembangunan Wilayah

Diperbanyak Di:
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
2015



PROPORSI KOMPONEN **BELANJA DAERAH** AGREGAT APBD **PROVINSI TA 2016**

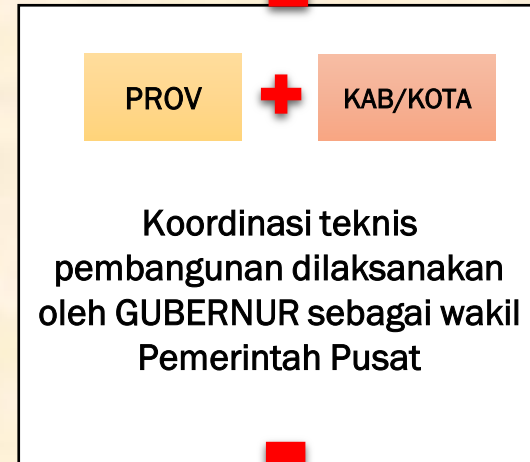
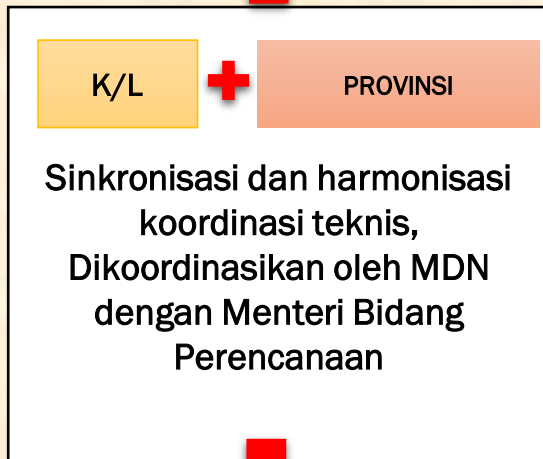




PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (Pasal 258 & Pasal 259)

TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL

TARGET
PEMBANGUNAN PROVINSI



TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat,
2. Kesempatan kerja,
3. Lapangan berusaha,
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
5. Daya saing Daerah.



**SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**





SOLUSI PERMASALAHAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 1** *Penerapan sanksi bagi KDH dan DPRD => PP Sanksi*
- 2** *Asisten dan evaluasi dalam penetapan kebijakan anggaran => Pembatalan APBD*
- 3** *Keterlibatan lembaga terkait => Korsubgah, Keterbukaan Informasi Keuda/Publik*
- 4** *Mendorong sistem aplikasi dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran => e-planning dan e-budgeting*
- 5** *Koordinasi dengan Kemenkeu, keterlibatan dalam mekanisme perencanaan.*



PRIORITAS NASIONAL DI PROVINSI JAMBI DALAM RANCANGAN RKP 2018



1. PERUMAHAN PEMUKIMAN

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala kota Kota Jambi

2. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM

3. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

- *Pelabuhan: Muara Sabak 55 M*
- *Kereta Api: Rantauprapat-K.Pinang-Duri-Dumai; Binjai-Besitang; Besitang-Langsa; Bandar Tinggi-Kuala Tanjung; Palembang-Jambi; Jambi-Pekanbaru; DED Pematang Siantar-Simalungun; Bireun-Lhokseumawe 3,9 T*



REKAP HASIL RAKORTEK REGIONAL I DAN REGIONAL II (Per 8 Maret 2017)

1. Total Usulan proyek K/L yang mendukung prioritas nasional sebanyak 8.925 proyek, yang sudah dibahas dan disepakati sebanyak 3.353 proyek.
2. Sedangkan dari total usulan proyek daerah yang mendukung prioritas nasional sebanyak 1.982 proyek, yang sudah dibahas dan disepakati sebanyak 968 Proyek.
Usulan Proyek Daerah di Provinsi Jambi antara lain: **Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi dan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan di Jalan Nasional.**
3. Untuk total proyek prioritas daerah sebanyak 72.016 proyek, yang sudah dibahas dan disepakati sebanyak 602 Proyek.



ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI



OTONOMI DAERAH

1. Berkaitan dengan direktif presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang kondusif serta dalam rangka pengawasan, terdapat 3.032 Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dibatalkan. Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut revisi terhadap perda yang dibatalkan baik revisi terbatas maupun keseluruhan.
2. Berkaitan dengan telah penataan perangkat daerah perlu ditindak lanjuti dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi, agar kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik.

POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Perubahan kelembagaan Kesbangpol di daerah

ADMINDUKAPIL

Belum berjalannya secara optimal pelayanan Admindukcapil, maka Kemendagri akan menganggarkan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk 2018 sebesar Rp. 825 Milyar.

PEMERINTAHAN DESA

1. Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.
2. Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.
3. Pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa.



ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI



DITJEN BANGDA

1. Masa jabatan Kepala Daerah yang telah berakhir, perlu dilakukan penyiapan penyusunan dokumen RPJMD;
2. Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor: 050/4963/sj Nomor: 0430/m.ppn/12/2016 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019;
4. Belum optimalnya pencapaian target pembangunan nasional, Kemendagri telah melakukan Rakortek Pembangunan Tahun 2017 (Regional I Batam-Regional II Makassar)
5. Hasil Rakortek agar dijadikan bahan pembahasan prioritas pada Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.



PENUTUP

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan daerah akan mengawal hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2018 serta penyempurnaan RKP Tahun 2018 melalui Musrenbangnas.
2. Kementerian Dalam Negeri melihat kesesuaian antar dokumen perencanaan pusat dan daerah (RKPD dengan RPJMD dan RKP).
3. Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi APBD dalam rangka konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH DAERAH

1. Hasil Musrenbang dijadikan bahan untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi JAMBI;
2. RKPD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018;



UPAYA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

SELURUH UNSUR
PENYELENGGARA PEMDA



koordinasikan, sinergikan
program & kegiatan RKPD
berdasarkan RPJMD & RPJMN



Dukung agenda prioritas dan
pencapaian sasaran
pembangunan nasional
Tahun 2018
(Dalam RPJMN 2015-2019)



Mewujudkan
VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN
2015-2019
“Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”



Bangun komitmen yang tinggi dan
bekerjasama melibatkan seluruh
kelompok & lapisan masyarakat dalam
membangun daerah



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TERIMA KASIH

